

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah dasar keuangan sering menjadi problema utama dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, literasi keuangan terdiri dari sejumlah kemampuan dan pengetahuan mengenai keuangan yang dimiliki oleh seseorang untuk mampu mengelola atau menggunakan sejumlah uang untuk meningkatkan taraf hidupnya dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan (Lusardi,2014).

Kondisi di Indonesia yang sebagai negara berkembang saat ini membutuhkan sumber daya manusia yang *cakap* finansial dalam peningkatan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat. Sumber daya manusia yang mampu mengelola dan menggunakan bentuk-bentuk variasi keuangan untuk mencapai kesejahteraan hidup yang lebih baik. Berdasarkan dari data BPS (2018), tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) yang di lihat dari harapan hidup, melek huruf, dan standar hidup di Indonesia sebesar 79,39%. Mengenai kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat memiliki peranan penting dalam proses peningkatan sumber daya manusia tersebut.

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari kebutuhan keuangan masyarakat. Di lihat dari persentase angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia, *relative* stabil dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas 5% per tahun yang dimana persentase angka kemiskinan mengalami penurunan hingga mencapai 9,41% per Maret 2019 (BPS,2019). Hal tersebut dapat di artikan

bahwa tingkat kebutuhan keuangan masyarakat meningkat untuk mencapai kesejahteraan dari waktu ke waktu karena pertumbuhan ekonomi pada masyarakat membutuhkan kemampuan dan penggunaan keuangan pada masyarakat itu sendiri.

Menurut dari Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2016 serta ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen atau Masyarakat (POJK Literasi dan Inklusi Keuangan) menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki indeks literasi keuangan dan indeks inklusi keuangan di 34 provinsi pada tahun 2013-2016 sebesar 29,66% dan 67,82%, berdasarkan wilayah provinsi indeks literasi keuangan dan indeks inklusi keuangan di Provinsi Sumatera Barat sebesar 27,27% dan 66,91%. Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan masih relatif rendah dan tidak merata pada setiap sektor industri jasa keuangan, sehingga berpengaruh pada rendahnya pemanfaatan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan (OJK,2017).

Selain itu, literasi keuangan tidak hanya terbatas pada pengertian pengetahuan, keterampilan dan keyakinan akan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan, melainkan sikap dan perilaku dapat memberikan pengaruh pada individu ataupun masyarakat dalam meningkatkan literasi keuangan (OJK,2017). *World Bank* (2016) menjelaskan bahwa inklusi keuangan sebagai akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat dan terjangkau dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun usahanya dalam hal transaksi, pembayaran,

tabungan, kredit dan asuransi yang digunakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Kependudukan di Indonesia saat ini mayoritas Islam dengan persentase angka kependudukan sebesar 87,18% dan untuk Provinsi Sumatera Barat khususnya Kota Padang 96,42% (BPS,2010). Hal tersebut menjadi langkah OJK untuk terus mendorong kemajuan Industri Keuangan Syariah yang telah berkembang dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data OJK hingga Agustus 2017, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp 1.048,8 triliun, yang terdiri dari aset perbankan syariah, IKNB syariah, dan pasar modal syariah. Dari jumlah tersebut jika dibandingkan dengan total aset industri keuangan yang mencapai Rp 13.092 triliun, maka *market share* industri keuangan syariah sudah mencapai 8,01% (OJK,2017). Sementara itu tingkat pemahaman masyarakat Indonesia tentang keuangan syariah masih rendah.

Sejumlah penelitian telah menunjukkan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dan penggunaan layanan jasa keuangan syariah dalam pencapaian kesejahteraan . Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka gerakan pembangunan literasi dan inklusi keuangan syariah bagi masyarakat mutlak di lakukan secara terencana dan berkesinambungan dengan perencanaan-perencanaan strategis dan langkah-langkah inisiatif berupa program aksi dengan melibatkan semua elemen masyarakat, khususnya *stakeholder* keuangan syariah dan regulator keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK,2017).

Bank Indonesia (2018), perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia bisa menjanjikan. Berdasarkan Laporan *Islamic Financial Services Board* (IFSB), aset perbankan syariah Indonesia berada di peringkat ke-9 terbesar secara global mencapai USD28,08 miliar. Hasil dari *Global Islamic Finance Report* 2017 yaitu aset keuangan syariah Indonesia menempati peringkat ke-10 secara global yang nilainya mencapai USD66 miliar, dan *Islamic Finance Country Index* meningkat menjadi 6% pada 2018, dari 7% pada 2017. Sementara itu, pada Juni 2018 pangsa perbankan Indonesia dalam hal aset mencapai sekitar 6% dari semua bank di Indonesia. Sedangkan total pangsa aset dalam industri keuangan syariah di Indonesia adalah sekitar 8,5% dari seluruh aset industri keuangan di Indonesia.

Negara yang bermayoritas muslim penting untuk mengetahui pemahaman terhadap pengetahuan dan pengelolaan tentang ilmu keuangan yang bersifat syariah serta layanan atau produk keuangan syariah, karena setiap muslim dituntut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, termasuk dalam berperilaku dan pengambilan keputusan dari segi keuangan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

“ Tidak akan bergeser kedua kaki anak adam di hari kiamat dari sisi Rabb-Nya hingga dia di tanya tentang lima perkara (yaitu) : tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan dalam hal apa (harta tersebut) ia belanjakan, serta apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya”. (HR. At-Tirmidzi no.2416, Ath-

Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, Jilid 10,hal 8, no.9772 dan telah di-*hasan-*kan oleh Syaikh Albani dalam Silsilah Al-Ahadis Ash-Shahihah no.946).

Hadist di atas bermaksud untuk menganjurkan kita agar mampu mempertanggungjawabkan segala keputusan yang di ambil terkait dengan harta yang diperoleh dan yang di maanfaatkan. Selain itu, *Islamic finance* pada saat sekarang ini disebabkan oleh timbulnya kesadaran dari masyarakat dalam memperbaiki pemahaman keuangan mereka yang berlandasan syariah. Adanya *trend hijrah* di kalangan masyarakat yang mendorong mereka untuk *reformasi* diri dengan mendalami agama islam karena sadar akan larangan oleh Allah SWT (Ibrohim,2016).

Lusardi & Mitchell (2014) menjelaskan bahwa literasi keuangan dapat di artikan sebagai pengetahuan keuangan dengan tujuan mencapai kesejahteraan. *Financial Litearcy Islamic* adalah sesuatu yang sangat penting untuk dapat memahami keuangan islam dengan dasar tugas keagamaan. Apabila umat islam tidak peduli dengan larangan seperti *riba*, *maysir*, *gharar* dan masyarakat terus menggunakan produk keuangan konvensional, maka sistem keuangan islam tidak akan pernah berkembang (Ahmad dan Hafeez,2010). Sehingga, *Islamic financial literacy* tidak hanya untuk mewujudkan pemahaman masyarakat mengenai konsep ilmu keuangan dan tata kelola keuangan saja tapi juga memperkenalkan kepada masyarakat tentang keuangan yang berbasis halal yang berpedoman kepada agama dengan tujuan untuk membentuk perilaku, pengambilan keputusan, dan meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan.

Bank Indonesia (2014) dalam Strategi Nasional Keuangan inklusif menggambarkan keuangan inklusi dengan kondisi hak setiap orang memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migran, dan penduduk di daerah terpencil. Hal tersebut tentunya bertujuan agar setiap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka salah satunya kebutuhan keuangan dalam pencapaian kesejahteraan pribadi maupun keluarganya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI (2008), kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan,keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup dan kemakmuran. Cara mengukur tingkat kesejahteraan meliputi kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, dan sosial lainnya (BPS,2018).

Islamic financial literacy di harapkan bukan hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan keuangan yang benar, cerdas dalam memilih investasi yang halal dan menguntungkan serta mencegah masyarakat mengikuti investasi bodong yang kerap muncul di tengah masyarakat (Agustianto,2014). Dengan adanya *Islamic financial literacy* ini akan membentuk cara pandang baru seseorang guna menghindari masalah-masalah dalam keuangan, yang disesuaikan dengan syariat islam yang berkaitan tentang *Islamic finance*,

sehingga masyarakat dapat mencapai kondisi keuangan yang sejahtera di masa depan. Bukan hanya *Islamic financial literacy* saja, perkembangan pemikiran *Islamic financial inclusion* khususnya terkait pemanfaatan potensi kegiatan yang bernilai sosial mencakup sistem zakat dan wakaf yang di harapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan mendukung stabilitas keuangan (Iskandar,2017).

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus kepada masyarakat usia kerja di Kota Padang, yang dimana masyarakat usia kerja menurut UU No.13 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 ayat 2 berada pada usia 15-64 tahun. Peneliti menjadikan masyarakat usia kerja sebagai objek penelitian karena ingin melihat bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat usia kerja di Kota Padang terhadap *Islamic financial literacy* dan *Islamic financial inclusion* nya. Oleh karena itu, peneliti ingin mengukur seberapa besar pengaruh *Islamic financial literacy* dan *Islamic financial inclusion* terhadap jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang sendiri dilihat dari jumlah penduduk per kecamatan dan kelompok umur pada tahun 2016 adalah sebanyak 914.968 orang (BPS,2016).

Mengingat pentingnya *Islamic financial literacy*, *Islamic financial inclusion* dan tingkat kesejahteraan masyarakat, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul: “**Pengaruh Tingkat *Islamic Finacial Literacy* dan Tingkat *Islamic Financial Inclusion* Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Survei Pada Masyarakat Usia Kerja di Kota Padang)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh tingkat *Islamic financial literacy* terhadap kesejahteraan masyarakat usia kerja di Kota Padang?
2. Bagaimanakah pengaruh tingkat *Islamic financial inclusion* terhadap kesejahteraan masyarakat usia kerja di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat *Islamic financial literacy* terhadap kesejahteraan masyarakat usia kerja di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui tingkat *Islamic financial inclusion* terhadap kesejahteraan masyarakat usia kerja di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktis

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini berguna untuk mengetahui seberapa besar tingkat *Islamic financial literacy* dan *Islamic financial inclusion* terhadap kesejahteraan masyarakat usia kerja di Kota Padang.

2. Akademis

Bagi pihak akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, informasi dan suatu kajian dimasa mendatang.

1.5 Ruang Lingkup Penulisan

1. Lingkup konseptual

Penelitian ini menggunakan teori *Islamic financial literacy* dan *Islamic financial inclusion*.

2. Lingkup kontekstual

Penelitian ini memiliki batasan konteks pada masyarakat usia kerja di Kota Padang.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

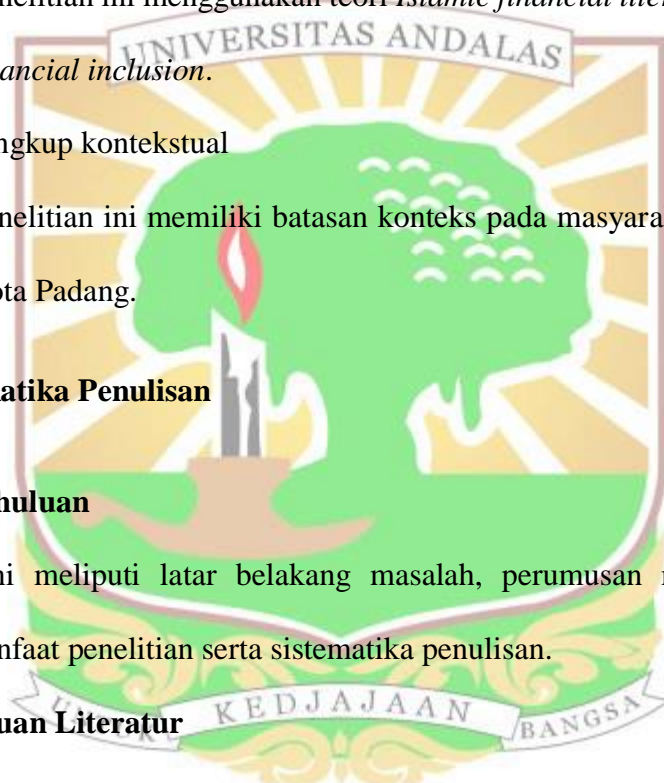
Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Literatur

Bab ini menjelaskan mengenai *Islamic financial literacy* dan *Islamic financial inclusion* terhadap kesejahteraan masyarakat usia kerja.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan operasionalisasi variabel, instrument penelitian dan metode analisis data.



BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai pembahasan dari hasil penelitian. Pembahasan penelitian berdasarkan pengolahan data yang dilakukan terdiri dari uraian mengenai gambaran umum dari hasil yang telah diteliti dan dianalisis mengenai pengaruh tingkat *Islamic financial literacy* dan tingkat *Islamic financial inclusion* terhadap kesejahteraan masyarakat (survey pada masyarakat usia kerja di Kota Padang)”.
UNIVERSITAS ANDALAS

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan berisi saran-saran dengan permasalahan yang diteliti.

